

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2019). Implementasi Kebijakan. *Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Arief Rachman Badrudin. (2020). EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERBASIS DARING SELAMA PANDEMI COVID 19 PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI BOGOR, 9(2), 209–224.
- Dr. Joko Widodo, M. S. (2021). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. (S. Wahyudi, Ed.) (12th ed.). Malang: Media Nusa Creative.
- Fadel Machmud, Marthen Kimbal, F. R. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *Ilmu Pemerintahan*, (2).
- Gita Chandra Irmawaty, A. W. (2021). GAMBARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBATAAN PERJALANAN DOMESTIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN COVID-19 TAHUN 2020 OLEH KKP TANJUNG PRIOK, 2(4).
- Hairi, P. J. (2020). IMPLIKASI HUKUM PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERKAIT PENCEGAHAN COVID-19, *XII*.
- Herdiana, D. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (PSBB) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), 2019.
- Ida Bagus Gde Winaya, Lita Tyesta, A. L. . (2016). PENGATURAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN, 12.
- Indriani, I. (2020). Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, 20(November), 129–144. <https://doi.org/10.21580/dms.2020.202.6162>
- Kurnia, T. S. (2017). Hukum dan keadilan: isu bagian hulu dan hilir, 10(11), 17–32.
- Larassaty, A. L. (2020). Analisis Efektifitas PSBB Terhadap Perubahan Budaya Masyarakat Di Kecamatan Sidoarjo, 5(2), 1–10.
- Likadja, J. A. C. (2015). Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat),” 1(1).
- M. Gazali Rahman, S. T. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Al-Himayah*, 4, 142–159.
- Nima Norouzi, E. A. (2021). Covid-19 Crisis and Environmental Law: Opportunities and Challenges, 7(1), 46–60. <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i1.2772>

- Pramesti, D. A. A. I. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BALI NO. 46 TAHUN 2020 DI DESA BATUBULAN, *10*(46).
- Pujaningsih, N. N. (2020). PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBATAHAN KEGIATAN WABAH COVID-19 DI KOTA DENPASAR, *6*, 458–470.
- Ramdhani, A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, 1–12.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945, *3*(2), 240–249.
- Saidah, D. (2020). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penangan Wabah Covid 19 di DKI Jakarta, *XII*(September), 20–30.
- Sanyoto. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia, (244), 199–204.
- Saraswati, P. S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid - 19 di Indonesia, *14*, 0–5.
- Sibuea, H. Y. P. (2016). Penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol.
- Sofyan, M. M. (2021). Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung, *1*(2), 62–73. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.156>
- Sudjana. (2020). Penegakan Hukum Karya Cipta, *22*(1), 89–110.
- Syahrin, M. A. (2017). The Implementation of Non- Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia, *1*(2), 168–178.
- Yustina, E. W. (2014). Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan, *1*(2), 248–269.